

116

# KOMUNIKASI SOSIAL DALAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT

Oleh: FXA. Ins. Semendison

FIKOM UNPAD

## 1. Pendahuluan

Pada bulan April tahun 1992 diperkirakan jumlah penduduk Indonesia yang terlibat dan mengenyam hasil pembangunan, terlibat komunikasi sosial mencapai sekitar 183 juta orang. Dari jumlah tersebut 65% atau sekitar 119 juta orang tinggal dan turut membangun di daerah pedesaan. Jumlah penduduk pedesaan dewasa ini sama dengan jumlah penduduk kota dan desa di Indonesia pada tahun 1971, dua puluh tahun yang lalu.

Kondisi jumlah penduduk pada masyarakat desa di Propinsi Jawa Barat (SP. 1990) polanya sama dengan kondisi penduduk pada masyarakat pedesaan secara nasional. Jumlah penduduk desa di Jawa Barat mencapai 23.172.348 (65,49%). Dari 20 kabupaten dan 4 kotamadya di Jawa Barat banyaknya desa/kelurahan sebanyak 7089 buah. Dan dari jumlah tersebut jumlah desa yang ada di daerah pedesaan sebanyak 5869 buah atau 82,79%.

Melihat kondisi jumlah desa dan jumlah penduduk yang ada di daerah pedesaan tersebut, maka perencanaan dan pelaksanaan dalam rangka perwujudan KAMTIBMAS dengan pendekatan komunikasi sosial menjadi menarik untuk kita bahas dan diskusikan. Menurut hemat saya makin menarik mengingat perkembangan masyarakat pedesaan dewasa ini dalam bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan pertahanan-keamanan sangat terasa sejak awal Pelita IV s/d akhir Pelita V ini. Secara keseluruhan hal tersebut terjadi akibat perencanaan pembangunan yang terarah dan teratur sejak Pelita I s/d Pelita V yang

dewasa ini memasuki tahun akhir dari Pembangunan Jangka Panjang Tahap I. Dan secara khusus yang ingin saya garis bawahi adalah *pengaruh dari alat-alat komunikasi sosial seperti televisi, radio, surat kabar dan film. Kemajuan yang luar biasa dari alat-alat komunikasi sosial tersebut telah masuk ke dalam sistem sosial masyarakat pedesaan yang sulit dibendung. Hal tersebut pasti akan mempengaruhi pola berpikir masyarakat pedesaan, serta akan mempengaruhi sistem pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat.*

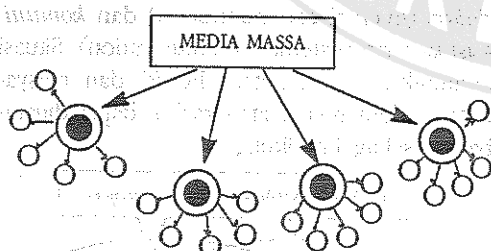
## 2. Peranan alat-alat komunikasi sosial

Pada awal tahun 1993 diharapkan pembangunan di Indonesia telah terjadi keseimbangan antara sektor pertanian dan sektor industri. Bila benar hasil evaluasi oleh wakil-wakil rakyat hasil Pemilu 1992 ini sesuai dengan GBHN 1988, maka masalah KAMTIBMAS menjadi makin kompleks. Menjadi makin kompleks mengingat masyarakat kita selain telah menyadari pentingnya teknologi dalam bidang pertanian dan teknologi dalam bidang industri, masyarakat kita jelas-jelas memasuki kondisi masyarakat informasi. Pertanyaan yang diajukan adalah... apakah masyarakat pedesaan kita sudah siap menerima kondisi seperti ini?

Alat-alat *komunikasi sosial (media massa)* seperti televisi, radio dan surat kabar atau majalah makin terasa sebagai kebutuhan hidup. Informasi-informasi pembangunan, hiburan, pendidikan dapat dengan mudah disalurkan lewat media massa ini. Di samping itu media massa sebagai *alat kontrol sosial*

sudah dapat dirasakan. Memang di sana sini masih ada hambatan dari kedua belah pihak.

Pada kesempatan ini akan dibuat contoh nyata *peranan media massa* dalam upaya menggalakkan partisipasi pembangunan bagi masyarakat pedesaan, yaitu melalui kegiatan Kelompencapir. Dalam dunia *komunikasi sosial* khususnya yang menggunakan media massa dikenal komunikasi *satu tahap* (One-step Flow of Communication) dan komunikasi dua tahap (Two-step Flow of Communication). *Komunikasi satu tahap menekankan peranan media massa dalam menyampaikan pesan* langsung diterima oleh masyarakat. Menurut hemat saya model ini sangat cocok dan tepat digunakan untuk masyarakat kota. Karena pada saat ini perhatian kita tujukan pada pembinaan KAMTIBMAS pada masyarakat pedesaan, maka pendekatan dengan model komunikasi dua tahaplah yang perlu didiskusikan. *Komunikasi dua tahap* ini menekankan pentingnya *peranan pemuka pendapat*. Para pemuka pendapat seperti *ulama, jawara, tokoh adat, guru, sesepuh desa* dan sebagainya memegang peranan sangat penting sebelum pesan yang berhubungan dengan KAMTIBMAS ini sampai kepada khalayak atau pada masyarakat desa secara utuh. Pendekatan komunikasi dua tahap ini telah dikembangkan Pemerintah melalui Kelompencapir dan hasilnya sudah dapat dirasakan, terutama di daerah pedesaan. Karena itu menurut hemat penulis konsep yang dikembangkan oleh *Pauld Lazarfeld* ini dapat dimanfaatkan untuk salah satu wadah pembinaan KAMTIBMAS sebagai basis di daerah pedesaan.



Gambar 1: Komunikasi Dua Tahap.

Keterangan gambar:

- ⊙ = Pemuka Pendapat (Opini Publik).
- ⊖ = Individu-individu dalam masyarakat yang melakukan kontak sosial dengan pemuka pendapat.

Bila komunikasi dua tahap tersebut digunakan sebagai langkah awal dalam penyampaian pesan KAMTIBMAS komunikasi sosial maka langkah berikut yang perlu dilakukan adalah melalui pendekatan komunikasi antar pribadi atau komunikasi kelompok. Dan pendekatan ini perlu memperhatikan dan mempertimbangkan apakah dalam kasus tertentu cocok menggunakan komunikasi linier atau menggunakan komunikasi yang bersifat konvergensi. Masalah komunikasi linier dan konvergensi ini akan dibicarakan secara khusus.

Kondisi pedesaan di Jawa Barat peranan *para pemuka pendapat* dalam hal-hal tertentu dianggap masih dominan. Dalam kaitan dengan pembinaan KAMTIBMAS justru para pemuka pendapat ini perlu diadakan pendekatan secara khusus pula. Di samping itu semua media massa yang pernah disebutkan dalam tulisan ini tersedia di wilayah Jawa Barat. Jawa Barat telah memiliki stasiun televisi sendiri baik milik pemerintah maupun milik swasta (TVRI dan RCTI). Stasiun radio bahkan sejak lama sebelum TVRI dan RCTI mengudara sudah menjadi salah satu alat komunikasi sosial di Jawa Barat. Pedesaan di Jawa Barat kini juga telah dijangkau Koran Masuk Desa (KMD) yang antara lain ditangani oleh surat kabar edisi Ciamis dan edisi Cirebon oleh harian umum Pikiran Rakyat.

Dengan makin berkembangnya perhatian Pemerintah membuat program listrik masuk desa, maka pemilikan televisi dan pemanfaatannya juga makin perlu dipertimbangkan oleh para perencana KAMTIBMAS. Radio dan televisi sudah merupakan kebutuhan hidup baik untuk menambah pengetahuan, pendidikan dan hiburan. Khusus melalui radio bila kita jalan-jalan ke pedesaan selalu kita temukan di rumah-rumah, di sawah atau di pekarangan maupun di pasar-pasar dan sebagainya. Berbeda dengan peranan surat kabar yang relatif masih kecil untuk masyarakat pedesaan. Akan tetapi mengingat model komunikasi yang ditawarkan adalah *komunikasi dua tahap* dan *peranan pemuka pendapat sangat dominan*, maka surat kabar khususnya surat kabar masuk desa perlu diperhitungkan. Menurut Prof. John Tondowi-

djojo, C.M. (1990:4) komunikasi sosial cenderung untuk mempergandakan kesadaran sosial. Alat-alat komunikasi sosial dapat memberi sumbangan yang besar bagi persatuan masyarakat pedesaan. Namun demikian, apabila pikiran hati manusia sudah jadi jabat dan tidak ada lagi kemauan baik di dalamnya, maka hasil-hasil teknologi ini dapat mengakibatkan pengaruh yang sebaliknya bagi masyarakat pedesaan.

Dalam berita-berita yang dimuat di media massa surat kabar terlampau sering, kita harus menyaksikan komunikasi sosial dipergunakan untuk menentang akal, menghancurkan nilai-nilai dasar kehidupan manusia. Gangguan KAMTIBMAS antara tahun 1987 s/d 1991 menunjukkan cukup besarnya data kasus pencurian berat terutama pada tahun 1991. Data pencurian berat tersebut mencapai tidak kurang dari 6.000 kejadian. Jenis kejahatan yang relatif lebih dari seribu kejadian tiap tahunnya (1991) selain pencurian berat tadi adalah masalah penipuan dan penganiayaan. Tiga contoh jenis kejahatan ini (pencurian, penipuan dan penganiayaan) banyak faktor penyebabnya, antara lain faktor ekonomi, lapangan pekerjaan, dinamika keluarga, kehidupan yang makin kompleks.

Berdasarkan gangguan KAMTIBMAS yang telah disebutkan, semua orang yang berkemauan baik didorong untuk bekerja sama memanfaatkan kemampuan alat-alat komunikasi sosial itu untuk dapat membantu tercapainya masyarakat yang hidup aman, tentram dan tertib.

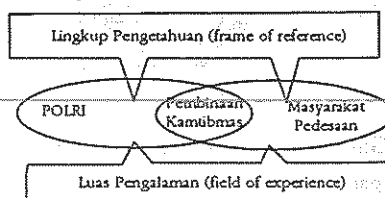
### 3. POLRI dan Masyarakat Pedesaan

POLRI dan masyarakat pedesaan saling memerlukan dalam pembinaan KAMTIBMAS. Akan tetapi kedua unsur ini ada kesamaan dan ada perbedaannya. Sebagai warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk mengisi kemerdekaan sesuai dengan Pancasila dan UUD tahun 1945. Akan tetapi dalam pembinaan KAMTIBMAS POLRI sebagai komunikator merupakan unsur utama dalam proses komunikasi sosial. Masyarakat sebagai komunikan merupakan unsur dasar. Kedua unsur tersebut saling melengkapi saling mengisi, akan tetapi untuk kondisi di daerah

pedesaan pemrakarsa tetap diperlukan. Komunikator yang mengambil inisiatif masih diperlukan.

Dalam teori komunikasi dikenal komunikasi linier dan komunikasi yang konvergensi. Dalam pembinaan KAMTIBMAS ini perlu dipahami benar perbedaan kedua teori ini. *Teori linier* menekankan pentingnya *peranan komunikator* yang dianggap sangat dominan, sangat aktif dan selalu mengambil inisiatif. *Teori konvergensi* menekankan pentingnya *kedua belah pihak* yang terlibat komunikasi sosial. Komunikator maupun komunikan (si penerima pesan) saling aktif, saling memerlukan dengan tekanan saling pengertian.

Komunikator adalah orang atau sekalian orang yang secara aktif mempergunakan alat-alat komunikasi sosial. Orang atau orang-orang ini mempunyai suatu kewajiban di dalam hati nurani untuk membuat dirinya mampu berkomunikasi, mampu menyampaikan gagasan-gagasannya dan karya mereka ini benar-benar berdaya guna, berhasil guna. POLRI sebagai kumpulan orang-orang yang berfungsi sebagai komunikator dalam mengambil inisiatif pembinaan KAMTIBMAS pada masyarakat pedesaan merupakan suatu lembaga. Sebagai suatu lembaga POLRI mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang tidak selalu sama dengan lembaga lainnya. POLRI dan masyarakat pedesaan adalah dua lembaga yang saling berkomunikasi, saling berinteraksi. Karena kedua belah pihak merupakan lembaga, maka proses komunikasi sosial yang terjadi menjadi lebih rumit. Hal ini disebabkan adanya kegiatan-kegiatan yang bersifat *komunikasi ke dalam* (internal communication) dan *komunikasi ke luar* (external communication). Situasi komunikasi sosial antara POLRI dan masyarakat pedesaan (rakyat) tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2: Komunikasi Sosial antara POLRI dan Masyarakat Pedesaan dalam Upaya Pembinaan KAMTIBMAS.

Komunikasi ke dalam. Di kalangan ABRI (baca POLRI) ada kebiasaan yang tidak dimiliki masyarakat pedesaan secara terprogram dan merupakan suatu kewajiban, suatu keharusan. Kebiasaan tersebut adalah masalah disiplin militer yang sangat tinggi, siap melaksanakan tugas setiap saat dan bersifat instruksional. Hubungan antara atasan dan bawahan sangat jelas. Pengalaman penulis sebagai orang sipil yang mengajar di SESKO ABRI (Susyawan ABRI), di SESKOAU dan di Susjabter serta Suspater dapat merasakan dan melihat secara langsung situasi komunikasi sosial tersebut. Saya melihat, bahwa model komunikasi linier sangat relevan dan cocok untuk kalangan ABRI (POLRI). Komunikasi linier pada kalangan POLRI ini lambat laun akan menjadi satu dengan dirinya dan akhirnya akan merupakan perilaku dalam setiap langkah. Kebiasaan tersebut memerlukan waktu untuk beradaptasi dengan masyarakat pedesaan bila akan melakukan pembinaan KAMTIBMAS. Gangguan pada pembinaan KAMTIBMAS dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dimiliki kedua pihak. Masing-masing pihak memiliki apa yang disebut dengan lingkup pengetahuan (frame of reference) dan luas pengalaman (field of experience), seperti tertera pada gambar 2.

Kedua faktor tersebut perlu mendapatkan perhatian sungguh-sungguh, terutama bagi pengambil kebijaksanaan dalam merencanakan pelaksanaan pembinaan KAMTIBMAS di daerah pedesaan. Salah menentukan komunikator yang tepat akan mengakibatkan pembinaan KAMTIBMAS tersendat-sendat. Dengan kata lain "perencanaan komunikasi sosial dalam upaya pembinaan KAMTIBMAS" perlu mempertimbangkan faktor internal yang ada pada POLRI yang hampir tidak ada pada masyarakat dan faktor eksternal yang ada pada masyarakat pedesaan.

Komunikasi ke luar. Sistem sosial yang ada pada masyarakat pedesaan dewasa ini mengalami perubahan yang luar biasa akibat dari hasil-hasil pembangunan selama 24 tahun ini. Yang mempengaruhi perubahan luar biasa tersebut antara lain akibat pembangunan jalan-jalan sebagai sarana transportasi yang membuat jarak antara desa yang satu dengan desa

yang lain terasa dekat, banyaknya putra-putra dari daerah pedesaan yang mengikuti pendidikan tinggi ke kota-kota besar seperti Bandung dan Bogor, banyaknya pemuka pendapat atau tokoh-tokoh masyarakat pedesaan yang mobilitasnya tinggi dengan masyarakat kota, perdagangan antara desa - kota yang terus meningkat. Perkembangan terakhir yang membuat perubahan sistem sosial budaya di pedesaan tidak dapat dibendung lagi adalah masuknya teknologi komunikasi seperti radio, televisi (baik milik pemerintah maupun milik swasta), dan surat kabar. Lebih-lebih bagi desa-desa yang telah dimasuki aliran listrik (listrik masuk desa). Penulis yang dilahirkan di pedesaan dan sering melakukan penelitian maupun membawa mahasiswa KKN di daerah pedesaan dapat pula merasakan bagaimana perubahan sistem sosial tersebut berkembang sangat pesat terutama sejak tahun 1970, saat dimulainya Pelita I.

Kembali pada gambar 2, masyarakat pedesaan yang semula dianggap komunikasi pasif (menurut model linier), dewasa ini menjadi sangat aktif akibat informasi-informasi dari luar maupun akibat perubahan itu sendiri. Model linier yang telah menjadi milik POLRI dalam komunikasi ke dalam tubuh lembaga ini seperti telah dibicarakan di muka menjadi "permasalahan baru" pada proses komunikasi sosial yang berhubungan dengan pembinaan KAMTIBMAS, bila para pelaku atau para pembina KAMTIBMAS dari unsur POLRI kurang peka dan tanggap terhadap "peranan baru" ini.

Pada masyarakat pedesaan sendiri sebenarnya komunikasi model linier juga masih berlaku. Akan tetapi polanya tidak terlalu jelas. Hal ini terjadi karena berhubungan dengan adat kebiasaan. Adat kebiasaan ini masih ada yang terus bertahan, tetapi juga ada yang mulai luntur akibat perubahan yang terjadi pada sistem sosial. Karena itu komunikasi linier yang terjadi di pedesaan tidak dapat disamakan dengan komunikasi linier yang terjadi di kalangan POLRI. Kondisi ini kiranya perlu disampaikan karena hal-hal seperti ini dalam pembinaan KAMTIBMAS di pedesaan akan merupakan salah satu hambatan. Idealnya pada kegiatan komunikasi pembinaan

KAMTIBMAS antar POLRI dan masyarakat pedesaan model komunikasi konvergensi dapat diterapkan; akan tetapi mengingat kondisi pada masyarakat pedesaan yang relatif pendidikannya rendah, keadaan sosial ekonominya belum baik bila dibandingkan dengan masyarakat kota, membuat tidak lancarnya pelaksanaan komunikasi sosial yang konvergen tadi.

Sebenarnya gangguan komunikasi sosial yang terjadi pada masyarakat pedesaan bukan terletak pada para pelaku komunikasi di pedesaan, melainkan akibat perkembangan yang terjadi itu sendiri. Melihat kondisi seperti ini, jalan pintas agar upaya pembinaan KAMTIBMAS berjalan lancar langkah-langkah yang perlu diambil antara lain:

1. Kemampuan perencana komunikasi sosial, melihat persamaan dan perbedaan antara mereka yang terlibat yaitu pada satu sisi pada POLRI dan sisi lain pada masyarakat pedesaan yang telah banyak mengalami perubahan sosial.
2. Kemampuan perencana komunikasi sosial menentukan siapa saja komunikator yang cocok untuk masing-masing daerah pedesaan yang menjadi sasaran pembinaan KAMTIBMAS. Dalam hal ini ada beberapa pendapat. Pendapat pertama adalah unsur dari POLRI yang memang lahir dan dibesarkan di pedesaan, akan tetapi juga memahami benar kebijaksanaan dari atasan. Unsur POLRI yang tidak perlu berasal dari pedesaan akan tetapi mempunyai kemampuan empati yang tinggi terhadap situasi dan kondisi daerah pedesaan yang menjadi sasaran, merupakan pertimbangan kedua. Untuk menentukan komunikator dari POLRI dalam pembinaan KAMTIBMAS sifat ketauladanan masih mutlak diperlukan bagi masyarakat pedesaan. Kadang-kadang seseorang cocok untuk komunikator di tempat A, tetapi belum tentu cocok untuk di tempat B, dan sebagainya, dan sebagainya.
3. Kemampuan perencana komunikasi sosial menentukan Pemuka Pendapat atau tokoh-tokoh masyarakat dalam upaya pembinaan KAMTIBMAS. Ada kecenderungan di tiap desa

terjadi "perlombaan" mengaku dirinya sebagai tokoh masyarakat. Penentuan tokoh masyarakat ini hendaknya dibuat netral, artinya perencana komunikasi sosial menempatkan tokoh masyarakat terpilih secara obyektif. Dalam kenyataan di lapangan hal ini kadang-kadang kita mengalami kesulitan bila tidak mempunyai konsep yang kuat.

4. Kemampuan perencana komunikasi sosial menjalin hubungan yang harmonis dengan kepala desa dan seluruh aparatnya. Tujuan hubungan yang harmonis ini untuk meningkatkan citra yang sama. Hal tersebut juga dilakukan dengan Camat dan seluruh stafnya. Dengan kata lain hubungan yang baik dengan aparat terkait dalam upaya mewujudkan desa sebagai basis KAMTIBMAS perlu penanganan secara terpadu, terlebih dalam perencanaannya. Tripida kecamatan merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dalam menentukan langkah-langkah pembinaan KAMTIBMAS di pedesaan.

\*) Disampaikan pada seminar tgl. 13 s/d 15 April 1992, sehubungan dengan upaya POLRI dalam rangka mewujudkan desa sebagai basis KAMTIBMAS di Jawa Barat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Jawa Barat, 1991. *Hasil Sensus Penduduk 1990*, Penduduk Jawa Barat, Kantor Statistik Propinsi Jawa Barat.
- McQuail, Denis, 1981. *Communication Models for the study of mass communication*, U.S.A.
- Oepen, Manfred, 1981. *Media Rakyat*, Komunikasi Pembangunan Masyarakat, P3M, Jakarta.
- Susanto, Astrid, 1981. *Komunikasi Sosial*, Binacipta, Bandung.
- Tondowidjojo, John, 1990. *Pedoman Komunikasi Sosial*, Sanggar Bina Tama, Surabaya.
- , 1991. *Komunikasi Pembangunan Masyarakat*, Sanggar Bina Tama, Malang.
- Bacaan tambahan**
- Hagul, Peter, 1985. *Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat*, Yayasan Dian Desa, Yogyakarta.
- Sumodiningrat, Gunawan, 1987. *Prospek Pedesaan 1987*, Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan, UGM, Yogyakarta.